

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI,
PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE
1996 - 2010**

RIZKA JUITA RACHIM



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1996 - 2010

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

RIZKA JUITA RACHIM
A111 08 278



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1996 - 2010

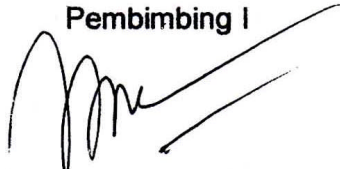
Disusun dan diajukan oleh

RIZKA JUITA RACHIM
A111 08 278

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

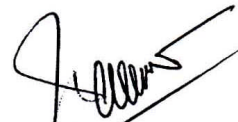
Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Dr. Paulus Uppun, S.E., M.A.
NIP. 19561231 198503 1 015

Pembimbing II



Dr. Nursini, S.E., M.A.
NIP. 19660117 199103 1 002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. DR. Hj. Rahmatia, MA.
NIP. 19630625 198703 2 001

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1996 - 2010


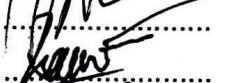



Disusun dan diajukan oleh

RIZKA JUITA RACHIM
A111 08 278

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **31 Mei 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Paulus Uppun, S.E., M.A.	Pembimbing I	1 
2	Dr. Nursini, S.E., M.A.	Pembimbing II	2 
3	Dr. H. Madris, DPS., M.Si	Penguji	3 
4	Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si,	Penguji	4 
5	Muh.Agung Ady Mangkilep, SE,.M.Si	Penguji	5 



Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. DR. Hj. Rahmatia, M.A.
NIP. 19630625 198703 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizka Juita Rachim
NIM : A111 08 278
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENGELUARAN
PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE
TAHUN 1996 - 2010**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,



Rizka Juita Rachim
Rizka Juita Rachim

PRAKATA



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Saw, beserta segala orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman. Skripsi dengan judul ” **Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996 - 2010**“ disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Untuk Ayahanda tercinta Drs.H.Abd Rachim Gani yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang begitu besar dan nyata. Bapak seorang lelaki yang terbaik sepanjang masa, Semoga Allah Swt senantiasa memberi kesehatan, menjaga dan memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah dilakukan oleh beliau.

2. Untuk Ibunda tercinta Hj. Mastura yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang begitu besar dan nyata, seorang Ibu yang terbaik, Ibu yang tiada duanya, selalu sabar dan tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa.
3. Untuk saudara - saudara tercinta kakak Adi bantuan dananya, kakak Arman bantuan otak encernya yang sangat luar biasa, kakak Irma dan Adik Yogi sang Pengganggu, dan kakak Ipar Melani tempat curhat saya, yang telah memberikan dorongan moril dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga penulis dapat memberikan contoh yang terbaik untuk kalian.
4. Untuk Rizky Setiawan yang selama proses ini memberikan semangat yang tak henti dan meluangkan waktunya menemani saya ke kampus (sayangnya sudah jadi mantan).
5. Untuk Sahabat Tercinta Astrid Citra Pradani Sukaepa alias Siluman Ular Togeang, terima kasih atas segala bantuan yang sudah kamu berikan.
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE, MS. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE.,MA. Selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA. Selaku pembimbing I, Dr. Nursini, SE., MA. selaku pembimbing II dan sekaligus penasehat akademik penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini

9. Untuk Pak Parman Selaku Pegawai akademik jurusan Ilmu Ekonomi, terima kasih pak untuk bantuannya, semua bantuan bapak sangat berarti bagi penulis dalam proses menuju seminar proposal sampai proses menuju ujian meja. Terima kasih pak sudah mengatur waktu untuk pelaksanaan ujian meja ketika saya menjalani ibadah umroh sehingga saya bias selesai sesuai dengan waktu yang sudah saya perkirakan.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua yang membutuhkan.

Makassar, Mei 2013

Penulis

Special thanks to

#ICONIC

➤ Pembimbing 0

Dewi Anggreani, SE (si dengkor), Wiwin Haerani, SE (orang paling sabarrrrrrrrrrr), Nurvadilla Putry (si bumil cantik), Bilal A Wahid, SE, (si super sibuk) makasih buat bantuannya dalam skripsi ini, terutama dlm pengolahan data serta keluhan2 ku.

➤ Teman-teman seperjuangan

Tidak ada teman seperjuanganku kodong ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

➤ Teman-teman yang terlebih dahulu menyandang SE

Hj. Nurul Huda, SE (Terima kasih satu kunci dunia agang syomb dengan segala kebaikan mu dan selama perkuliahan saya bisa nebeng di mobilmu sekalipun jadi supirta beb...loveyou), Rini Ardilawanti, SE (tukang curhat nda jelas tapi sa'bara na luar biasaaaaaa), Dewi Anggreani, SE (tukang badmood.. dikit dikit badmood tapi agang luarrrrrrrrrrrrr biasaaaaaa juga), Wiwin haerani, SE (ini mi ini tempat curhat terselubungku,, tena tommo dua na, hahahaha), Nur vadila Putri, SE (si bumil yang tak pernah bosannya rumahnya

saya datang,,sekalinaaa tetangga,,nyesalko pasti tetangga sama saya toh?),
Andi Neno Ariani, SE (si miss galau gara gara kebanyakan mantan,,hmhhh)
Ulfhy Alvini, SE. (si perempuan kuat yahh biasa dibilang premanya ICONIC,
hahaha), Normawati, SE (si gatelll bawaannya mau digaruk,,hobi ta ganti pacar
ye',,tp mau tommy tawwa nikah,,uhuyyy).

Dan seluruh teman- teman ICONIC ku tercinta... maafkangaaaa nda
kusebutki semua,, bukan artinya kita semua tidak berarti tapi karena banyak
duduki teman-teman.. LOVEYOU ICONIC...

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010

Analysis Effects of Provincial Minimum Wages, Government Spending, Private Investment and Total Population for Unemployment in South Sulawesi Year Period 1996-2010

Rizka Juita Rachim

Tujuan Penelitian untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010.

Model Regresi Berganda (*Multiple Regression*) dengan menggunakan Eviews 5,1, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan, sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan periode 1996-2010.

Kata kunci : Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Jumlah Penduduk, Regresi Berganda.

Research objectives to measure and analyze how much influence the provincial minimum wage, government spending, private investment, and Total Population for Unemployment in South Sulawesi 1996-2010 period.

Multiple Regression Model (Multiple Regression) using Eviews 5.1, shows that government spending, private investment, and Total Population and significant negative effect on Unemployment in South Sulawesi, while the Provincial Minimum Wage positive and significant effect on Unemployment in South Sulawesi the period 1996-2010.

Keywords: Unemployment, Provincial Minimum Wage, Government Spending, Private Investment, Population, Multiple Regression.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Konsepsional.....	9
2.1.1 Teori tentang Pengangguran.....	9
2.1.2 Teori tentang UMP.....	11
2.1.3 Teori tentang Pengeluaran Pemerintah.....	13
2.1.4 Teori tentang Investasi Swasta.....	15
2.1.5 Teori tentang Jumlah Penduduk.....	17
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.1 Hubungan UMP dengan Pengangguran Terbuka.....	18
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran Terbuka	19
2.2.3 Hubungan Investasi Swasta dengan Pengangguran Terbuka	19
2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran Terbuka.....	20
2.3 Tinjauan Empiris.....	20
2.4 Kerangka Konseptual.....	22
2.5 Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Variabel Penelitian.....	25
3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variables).....	25
3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variables).....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26

3.4 Metode Analisis Data.....	26
3.5 Defenisi Operasional.....	28
3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis.....	29
3.6.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	29
3.6.2 Uji F Statistika.....	29
3.6.3 Uji T Statistika.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1 Deskripsi Perkembangan Variabel.....	31
4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka Di Sulawesi Selatan.....	31
4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Di Sulawesi Selatan.....	33
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Sulawesi Selatan.....	36
4.1.4 Perkembangan Investasi Swasta Di Sulawesi Selatan.....	37
4.1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Di Sulawesi Selatan.....	39
4.2 Analisis Hasil Estimasi Regresi.....	41
4.3 Intepretasi Hasil Analisis.....	42
4.3.1 Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Terbuka.....	42
4.3.2 Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran Terbuka.....	43
4.3.4 Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka.....	45
4.4 Pengujian Hipotesis.....	46
4.4.1 Uji T Statistik.....	46
4.4.2 Uji F Statistik.....	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	3
4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	32
4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	34
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	36
4.1.4 Perkembangan Investasi Swasta di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	38
4.1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010.....	40
4.2 Hasil Estimasi.....	41
4.7 Pengujian T Statistik.....	46
4.8 Pengujian F Statistik.....	48

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan	
Periode Tahun 1996-2010.....	32
Grafik 4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Selatan	
Periode Tahun 1996-2010.....	35
Grafik 4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Sulawesi Selatan	
Periode Tahun 1996-2010.....	37
Grafik 4.1.2 Perkembangan Investasi Swasta di Sulawesi Selatan	
Periode Tahun 1996-2010.....	38
Grafik 4.1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan	
Periode Tahun 1996-2010.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata

Lampiran 2 Hasil Estimasi Regresi.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan. Hilangnya sumber penghasilan membuka peluang penduduk mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mampu membawa mereka kedalam jurang kemiskinan. Persoalannya semakin rumit karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang mungkin ditimbulkannya, contohnya menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, kemiskinan dan pemborosan yang luar biasa (BPS, 2007).

Setiap negara khususnya negara berkembang mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan untuk mengendalikan peningkatan pengangguran. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini, menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang ada. Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja yang ada.

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu Negara membuang

barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuleson, 2008).

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya bekerja disektor modern atau dikantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia untuk menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah tersebut. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah didaerah atau provinsi yang kegiatan ekonominya masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan didaerah itu masih rendah (Mudjadrat, 2006).

Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1996 – 2010 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010

Tahun	Data Pengangguran Terbuka (jiwa)
1996	166,979
1997	138,057
1998	169,942
1999	213,085
2000	284,983
2001	117,196
2002	170,043
2003	224,958
2004	235,590
2005	551,514
2006	363,475
2007	372,614
2008	311,668
2009	314,564
2010	298.852

Sumber : BPS 2011

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 1996 – 2010, secara umum jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan yang tajam terlihat terjadi pada tahun 2005. Namun, pada tahun-tahun tertentu jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan. Misalnya, pada tahun 2006, walaupun pada tahun 2005 jumlah pengangguran meningkat tajam, tapi jumlah tersebut menurun dari 551.614 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 363.475 juta jiwa pada tahun 2006. Dan berdasarkan data dari BPS tersebut, secara umum, tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan memang mengalami penurunan tetapi Sulawesi Selatan belum berhasil mengungguli 4 provinsi lain di

kawasan pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat). Tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan berada di posisi kedua tertinggi untuk pulau Sulawesi.

Adapun indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain besaran upah yang berlaku, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan jumlah penduduk. Apabila tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Dimana, saat ini pemerintah masih meyakini bahwa upah minimum juga merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah. Hal yang juga diyakini oleh *International Labor Organization* (ILO) yang mengemukakan bahwa “*minimum wages have an important role to play in protecting low income groups*” (ILO, 1991 dalam Iskandarsyah 1996).

Disamping itu dengan pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, namun bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat. Menurut teori ini pasar tenaga kerja sama saja dengan pasar lainnya yang membutuhkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Bila upah minimum berada di atas upah riil maka akan terdapat surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, dalam teori ini penetapan upah minimum pada dasarnya adalah investasi terhadap mekanisme pasar, dan setiap investasi terhadap mekanisme pasar akan menyebabkan ketidakefisienan. Seperti yang dikemukakan oleh *World Bank* bahwa pada kenyataannya upah minimum hanya akan meningkatkan biaya tenaga kerja di sektor formal yang menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut menurun dan kemudian menyebabkan meningkatnya penawaran tenaga kerja di sektor informal dan di sektor pedesaan, yang pada akhirnya

menyebabkan penghasilan pekerja yang berpenghasilan rendah menjadi semakin rendah (*World Bank*, 1990 dalam Iskandarsyah, 1996)

Indonesia tidak mungkin menyerahkan penetapan upah pekerja atau buruh kepada mekanisme pasar sebab di dalam pasar tenaga kerja kita masih terlihat ketidakseimbangan struktural. Menurut Simanjuntak (2001) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Selain itu, semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran

Dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Adapun kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, misalnya selama ini pengeluaran pembangunan lebih banyak ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang padat modal atau misalnya, untuk merestrukturisasi

permodalan perusahaan-perusahaan konglomerat seperti bank-bank swasta atau juga karena sistem birokrasi pemerintah yang kurang efisien yang menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya bertambah.

Dilihat dari sisi investasi yang akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000).

Dan dilihat pula dari sisi jumlah penduduk yang semakin meningkat diikuti pula dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Usaha penelitian sudah banyak dilakukan secara mendalam dan mencakupi secara luas berbagai bidang kegiatan ekonomi dengan penelaahan serangkaian variabel dalam kaitannya dengan permasalahan pengangguran sehingga diperlukan suatu studi lebih lanjut dengan penyertaan variabel lain yang sesuai agar hasilnya lebih baik lagi. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran**

Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010.”

1.2. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (X_1), Pengeluaran Pemerintah (X_2), Investasi Swasta (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (X_1), Pengeluaran Pemerintah (X_2), Investasi Swasta (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti yang berhubungan dengan Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bagi Pemerintah pusat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait masalah pengangguran khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bagi calon peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian sejenis lainnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Teori tentang Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Orang yang menganggur tersebut dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu (Sandy Dharmakusuma, 1998).

Pengangguran Terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Mulyadi Subri, 2003). Sedangkan menganggur dibagi menjadi dalam dua kelompok yaitu: (1) setengah menganggur kentara (*visible unemployment*) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan (2) setengah menganggur tidak kentara (*invisible unemployment*) yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah (Payaman. J. Simanjuntak, 1985).

Pengangguran dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara misalnya menurut wilayah geografis, jenis pekerjaan dan alasan mengapa orang tersebut menganggur. Berikut jenis pengangguran menurut sifat dan penyebabnya :

1. Pengangguran Friksional adalah perubahan dalam komposisi seluruh permintaan dan oleh karena masuknya kedalam pasar tenaga kerja

para pencari kerja pertama kalinya yang informasinya tidak sempurna dan membutuhkan biaya modal (Payaman. J. Simanjuntak, 1985).

2. Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktural komposisi perekonomian (Payaman. J. Simanjuntak, 1985). Sedangkan menurut Mulyadi Subri (2003) pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasi dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.
3. Pengangguran Siklis terjadi karena kurangnya permintaan. Pengangguran ini terjadi apabila pada tingkat upah dan harga yang berlaku, tingkat permintaan tenaga kerja secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaganya (Payaman. J. Simanjuntak, 1985).
4. Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Pengangguran musiman bersifat sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu (Sukirno, 1994).
5. Pengangguran Sukarela yaitu pengangguran yang terjadi kalau ada pekerjaan yang tersedia, tetapi orang yang menganggur tidak bersedia menerimanya pada tingkat upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut (Payaman. J. Simanjuntak, 1985).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya; (1) jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara penawaran dan permintaan); (2) kesenjangan

antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja; (3) masih adanya anak putus sekolah dan lulus yang tidak terserap di dunia kerja dan berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai; (4) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Dari keempat faktor-faktor tersebut, faktor pertama, kedua, dan ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dari gambaran diatas, maka perlu dikembangkan program-program kursus dan pelatihan dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran (Disnakertrans, 2009).

Masa menganggur adalah periode dimana seseorang terus menerus menganggur atau lamanya menganggur rata-rata seorang pekerja. Menurut Sandy Dharmakusuma (1998), lama menganggur tersebut tergantung pada: (a). Organisasi pasar tenaga kerja, berkenaan dengan ada atau tidak adanya lembaga atau penyalur tenaga kerja dan sebagainya; (b). Keadaan demografis dari angkatan kerja, sebagaimana telah dibahas diatas; (c). Kemampuan dari para penganggur untuk tetap mencari kerja yang lebih baik; (d). Tersedianya dan bentuk perusahaan.

2.1.2 Teori Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk menjaga keberadaan

karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat (Setiadi, 2009).

Ada beberapa pengertian mengenai upah yang dikemukakan oleh ketentuan peraturan perundangan dan beberapa ahli, antara lain : (1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Bab I Pasal 1 angka 30 dijelaskan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dan dalam Bab X Bagian Kedua tentang Pengupahan Pasal 88 diatur sebagai berikut : (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh; (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya; (e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f). bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i). struktur dan skala pengupahan yang proposional; (j). upah untuk pembayaran pesangon; dan (k). upah untuk perhitungan pajak penghasilan; (4)Pemerintah menetapkan upah minimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (UU No. 13 tahun 2003 pasal 1).

Dalam Pasal 89 ayat (1) upah minimum terdiri atas: (a). Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b). Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut.

Menurut Samuelson (1997 dalam Alghofari 2010) menyatakan bahwa peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1992) pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive* yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lainnya. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja,

yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada Negara-negara sebagai hadiah. Oleh karena itu, dalam mengatur pengeluarannya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil mengenai pengeluarannya dapat dilaksanakan tepat sasaran, baik untuk yang akan menikmati ataupun pihak lain yang terkena kebijakan tersebut.

Keynes (dalam Kusnendi, 2001) menyatakan teorinya berhubungan dengan semua tingkat kesempatan kerja yang mungkin terjadi (*Full Employment* maupun *Under Employment*). Dan masalah ekonomi seperti pengangguran disebabkan karena rendahnya *Effective Demand* atau Permintaan Agregat. Jadi, teori Keynes menitikberatkan kepada *demand side* sebagai unsur aktif yang menggerakkan perekonomian. J.M. Keynes (dalam Sukirno, 2004) menyatakan bahwa :

“Pengeluaran Agregat yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara/wilayah. Seterusnya, Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan memerlukan usaha serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh.”

Peranan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak didalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong insentif dan usaha swasta, dan dalam menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian. Dalam kancah perekonomian modern, peran

pengeluaran pemerintah dapat ditelaah menjadi 4 peranan yaitu; (1) peran alokatif yaitu peranan pengeluaran dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan mendukung efisiensi produksi; (2) peran distributif yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan kerja dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan merata; (3) peran stabilisatif yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium; (4) peran dinamisatif yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.4 Teori Investasi Swasta

Investasi disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi.

Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian

(Sukirno, 2001). Menurut Suparmoko (1993) memberikan arti investasi sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi 3 (Sukirno, 2001) yaitu antara lain: (1) *Autonomous investment*, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek sosial budaya yang ada di masyarakat; (2) *Induced investment*, yaitu macam investasi yang mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kenaikan pendapatan yang ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau penambahan permintaan terhadap barang sudah tentu akan mendorong untuk melakukan investasi; (3) Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga uang atas modal yang berlaku di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi (Deliarnov, 1995) yaitu antara lain sebagai berikut: (a) Inovasi dan Teknologi, adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih; (b) Tingkat Perekonomian, makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan; (c) Tingkat Keuntungan Perusahaan, makin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka makin banyak bagian laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi; (d)

Situasi Politik dimana jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi. Salah satu kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal. Penanaman modal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Untuk investasi swasta di Indonesia yang dilakukan dengan kemudahan fasilitas berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2.1.5 Teori Jumlah Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran (Sukirno,2000). Tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk adalah unsur penting dalam proses pembangunan. Bahkan, Adam Smith menganggap bahwa manusialah sebagai factor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Selain itu, dalam usaha meningkatkan produksi dan pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan sangat penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan sebagai tenaga usahawan yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi (Mulyadi S,2002).

Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan ekonomi akan menimbulkan masalah tersendiri bagi sebuah Negara atau daerah. Oleh karena itu, untuk dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan yang dimilikinya. Ini akan membawa

konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Meskipun demikian, ada juga yang beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar bagi suatu Negara juga bisa sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu sebagai pasar yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat itu sendiri, sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses pembangunan dan dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang berkarya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Pengangguran Terbuka

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya

dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*).

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran Terbuka

Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Misalnya, proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan padat karya akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja pada masyarakat.

2.2.3 Hubungan Investasi Swasta dengan Pengangguran Terbuka

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2000), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap Negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama

investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran Terbuka

Kenaikan jumlah penduduk yang dialami mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah. Berdasarkan penjelasan ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori ini menjelaskan apabila kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Akibatnya penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, apabila penduduk sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, maka produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2.3 Tinjauan Empiris

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut:

Farid Alghofari tahun 2010, Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980 - 2007. Variabel penelitian yang digunakan tingkat inflasi, besaran upah, pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran.

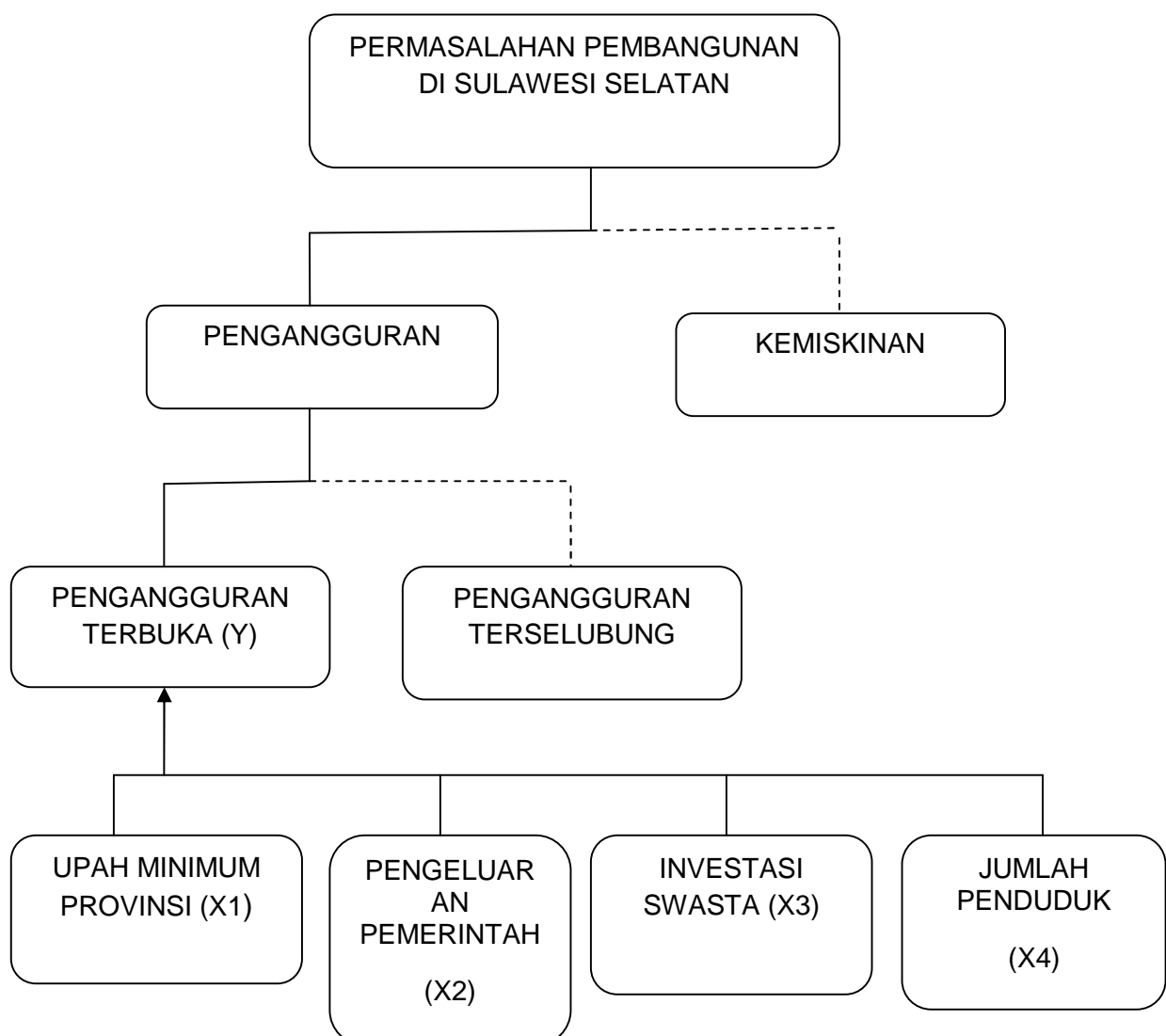
Moch. Rum Alim tahun 2007, Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1980-2007. Variable yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi dan pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sejak tahun 1980 sampai 2007.

Penelitian oleh Daryono Soebagiyo, Maulidyah Indira Haswarini, dan Chuzaimah (dipublikasikan pada tahun 2005), yang berjudul "Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat BTP, dan Pendidikan terhadap Pengangguran di propinsi Dati I Jawa Tengah". Penelitian dilakukan menggunakan model penghitungan Partial Adjustment Model (PMA). Penelitian ini memberikan hasil pendidikan memiliki signifikansi terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sementara kesempatan kerja dan BTP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis membuat kerangka konseptual atas penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dimana besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah memiliki hubungan negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Perluasan kesempatan kerja dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Peningkatan output cenderung didorong oleh investasi serta kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian akan mendorong naiknya perluasan kesempatan kerja. Artinya melalui investasi atau pengeluaran pemerintah, akan menaikkan penciptaan output, yang nantinya akan memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Akan tetapi jika pengangguran masih terus mengalami peningkatan, hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah diimpikan. Hal ini karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, dan kestabilan politik, yaitu: (1) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu,

kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah; (2) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun.

Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun; (3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teoritis tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum dari segi pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu: pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variables*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk.

3.2.2 Variabel terikat (*Dependent Variables*)

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain termasuk. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengangguran Terbuka.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 1996-2010. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang dipergunakan meliputi: data Upah Minimum Provinsi, data Pengeluaran Pemerintah, data Investasi Swasta, data Jumlah Penduduk, dan data Pengangguran Terbuka. Data-data ini diperoleh dari dinas terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Model ini memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dalam hal ini Upah Minimum Provinsi (X_1), Pengeluaran

Pemerintah (X_2), Investasi Swasta (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) dengan variable terikat yaitu Pengangguran Terbuka (Y), maka bentuk persamaannya sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \text{ -----(1)}$$

Dengan demikian dapat dikemukakan model analisisnya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu \text{ -----(2)}$$

Dimana :

Y	: Pengangguran Terbuka (dalam jiwa)
X_1	: Upah Minimum Provinsi (dalam Rupiah)
X_2	: Pengeluaran Pemerintah (dalam Rupiah)
X_3	: Investasi Swasta (dalam Dollar)
X_4	: Jumlah Penduduk (dalam Jiwa)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien masing-masing variabel
α	: Konstanta
μ_i	: Residu/error term

Atau secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas, yaitu:

$$Y = \alpha X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} e^{\mu} \text{ -----(3)}$$

Berdasarkan fungsi persamaan di atas maka dikembangkan ke dalam bentuk regresi berganda dan linier (ordinary least square) dengan mentransferkan persamaan (3) dalam bentuk Ln, sehingga diperoleh persamaan estimasi sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = \text{Ln } \alpha + \beta_1 \text{Ln } X_1 + \beta_2 \text{Ln } X_2 + \beta_3 \text{Ln } X_3 + \beta_4 \text{Ln } X_4 + \mu \text{ ----- (4)}$$

Persamaan di atas digunakan untuk menghitung nilai koefisien α , β_1 , $\beta_2, \beta_3, \beta_4$

3.5 Definisi Operasional

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_1) adalah balas jasa berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. UMP adalah merupakan tingkat upah terendah bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, diukur menggunakan upah minimum per bulan provinsi Sulawesi Selatan dengan satuan rupiah.
2. Pengeluaran Pemerintah (X_2) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya. Yang dimaksud pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi pengeluaran pembangunan dan belanja modal yang didanai dan tercantum dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam satuan nilai rupiah
3. Investasi Swasta (X_3) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dalam hal ini dibiayai melalui investasi yang berasal dari pihak swasta. Dan dinyatakan dalam satuan Dollar.
4. Jumlah Penduduk (X_4) adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah, dimana jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Dinyatakan dalam satuan Jiwa.

5. Pengangguran Terbuka (Y) adalah Pengangguran Terbuka adalah jumlah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2008). Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data dari BPS

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan Eviews 5.1, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen (Pengangguran Terbuka).

3.6.1 Analisis Koefisien Determinasi ()

menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap variabel dependen, semakin besar semakin besar peranan variabel dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai berkisar antara 0 sampai 1.

3.6.2 Uji F Statistika

Uji F digunakan untuk melihat kevalidan model regresi yang digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan kriteria uji,

jika $>$ maka H_0 ditolak

jika $<$ maka H_0 diterima.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka.

3.6.3 Uji t Statistika

Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), nilai t hitung dari masing-masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika t-hitung $>$ t-tabel dengan prob-sig $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 0,05$) berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Perkembangan Variabel

4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan

Pengangguran adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (BPS, 2008). Tingkat Pengangguran Terbuka diperkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di Negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

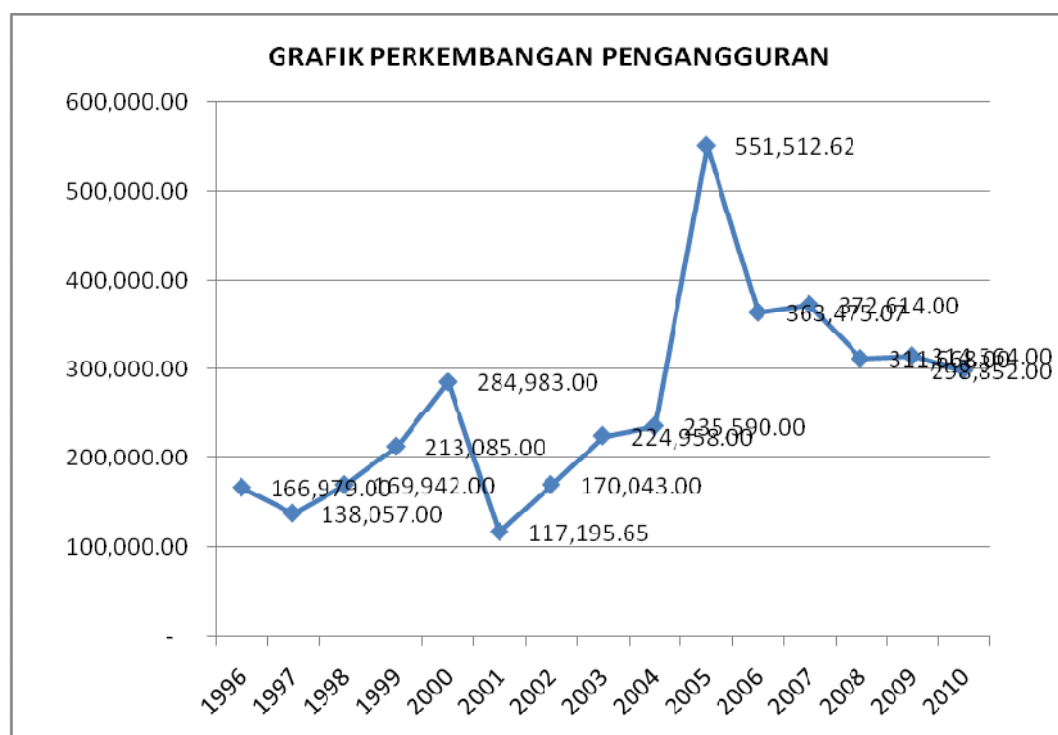
Berikut ini disajikan data tentang pengangguran yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1996 – 2010.

**Tabel 4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan
Periode Tahun 1996-2010**

Tahun	Data Pengangguran Terbuka (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1996	166.979	-
1997	138,057	-17.32
1998	169.942	23.10
1999	213,085	25.39
2000	284,983	33.74
2001	117,196	-58.88
2002	170,043	45.09
2003	224,958	32.29
2004	235,590	4.73
2005	551,514	134.10
2006	363,475	-34.09
2007	372,614	2.51
2008	311,668	-16.36
2009	314,564	0.93
2010	298.852	-4.99

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

**Grafik 4.1.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan
Periode Tahun 1996-2010**



Berdasarkan tabel dan grafik 4.1 Perkembangan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan dari tahun 1996 sampai 2010 mengalami peningkatan terus menerus dan mencapai puncak pada tahun 2005 yaitu 551,514 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tingkat pengangguran yang drastis pada tahun 2005 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga Bahan Baku Minyak merupakan salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi aspek kehidupan sehingga kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan biaya produksi bagi perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar.

Tingkat Pengangguran pada tahun 2005 sampai 2010 mengalami penurunan secara terus menerus dengan penurunan hampir mencapai 298,852 pada tahun 2010.

4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Selatan

Upah Minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima karyawan/pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun. Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun maka upah yang diterima diatur

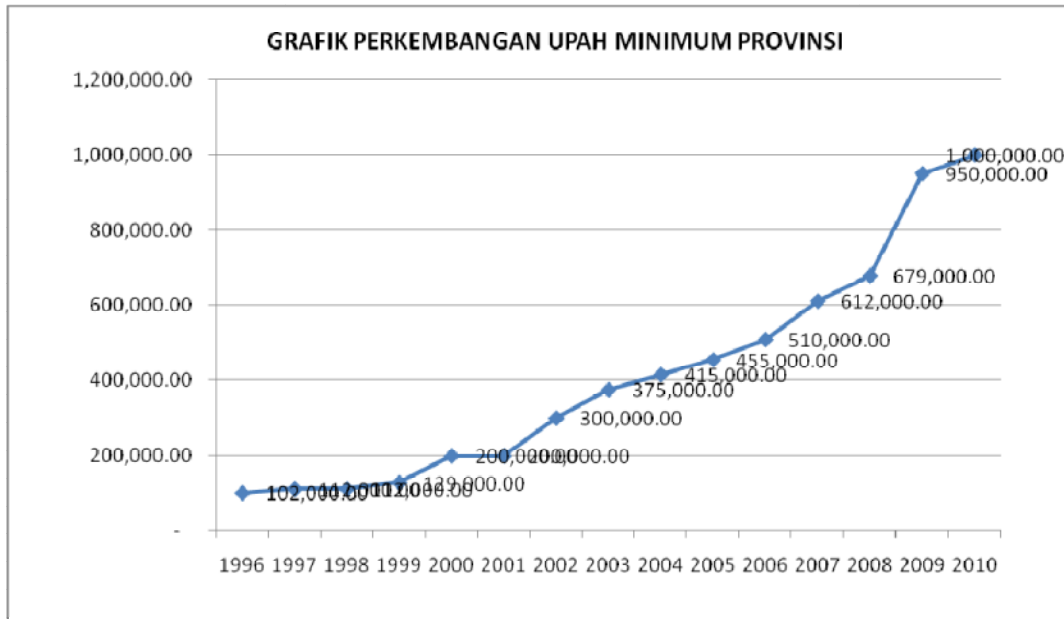
oleh peraturan perusahaan dengan system pengupahan yang telah disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Penetapan upah minimum disetiap kabupaten/kota harus berdasarkan kesepakatan tripartite antar buruh, pengusaha dan pemerintah. Fungsi upah minimum pada dasarnya sebagai jarring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja sehingga penentuannya tetap melibatkan pemerintah. Berikut ini disajikan data tentang Upah Minimum Provinsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1996 – 2010.

Tabel 4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010

Tahun	Data Upah Minimum Provinsi (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1996	102.000	-
1997	112.000	9.80
1998	112.000	0.00
1999	129.000	15.18
2000	200.000	55.04
2001	200.000	0.00
2002	300.000	50.00
2003	375.000	25.00
2004	415.000	10.67
2005	455.000	9.64
2006	510.000	12.09
2007	612.000	20.00
2008	679.000	10.95
2009	950.000	39.91
2010	1.000.000	5.26

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010



Berdasarkan tabel dan grafik 4.2, Tingkat upah minimum di Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan upah ini berdasarkan dengan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat upah ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, peningkatan upah ini secara umum diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja para pekerja serta untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Tingkat upah minimum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan upah tiap tahun ini jumlahnya tidak menentu. Umumnya, tingkat upah minimum tiap tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000 - Rp.100.000, tetapi pada tahun 2008 ke 2009 peningkatan upah ini mencapai Rp.200.000 lebih.

4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Sulawesi Selatan

Peranan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak didalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong insentif dan usaha swasta, dan dalam menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian. Adapun kebijakan pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi masalah pengangguran melalui kebijakan fiskal, dalam hal ini pengeluaran pemerintah yang ekspansif tampaknya belum mendatangkan hasil yang signifikan, pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan ternyata diiringi pula oleh bertambahnya jumlah pengangguran. Berikut ini disajikan data tentang Pengeluaran Pemerintah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1996 – 2010.

Tabel 4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Sulawesi Selatan Periode Tahun 1996-2010

Tahun	Data Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1996	48.469.472.319,50	-
1997	99.612.151.788,15	105.52
1998	113.695.038.501,44	14.14
1999	141.653.532.338,51	24.59
2000	266.502.643.545,92	88.14
2001	312.903.630.405,37	17.41
2002	319.875.700.070,76	2.23
2003	348.509.037.716,46	8.95
2004	429.088.916.943,31	23.12
2005	475.079.502.186,52	10.72
2006	477.096.207.323,67	0.42
2007	622.154.318.875,74	30.40
2008	766.939.686.784,91	23.27
2009	1.267.102.609.276,75	65.22
2010	1.890.519.925.450,58	49.20

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan